

BAB IV

ANALISIS

Persoalan pendidikan merupakan masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Selama manusia ada, maka selama itu pula persoalan pendidikan ditelaah dan direkonstruksi dari waktu ke waktu, baik dalam arti mikro, seperti tujuan,, metode, pendidik dan pembelajaran, baik konsep filosofinya maupun tatanan praktiknya dalam hubungannya dengan pendidikan. Karena masalah kehidupan manusia pada umumnya dicari pemecahannya melalui pendidikan.

Dalam kehidupan manusia, terutama pendidikan Islam, sangat besar pengaruhnya, karena Islam sebagai petunjuk Ilahi mengandung implikasi kependidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin melalui proses tahap demi tahap. Islam sebagai ajaran mengandung sistem nilai dimana proses pendidikan Islam berlangsung dan dikembangkan secara konsisten untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Realisasi dan cita-cita itu adalah untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah maupun bahasanya baik secara perorangan maupun secara kelompok. Pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.

Sedangkan tujuan terakhir dari Pendidikan Islam itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagai hamba Allah yang berserah pada khalik-Nya, ia seharusnya menjadi hamba yang berilmu pengetahuan, sesuai kehendak penciptanya, agar terealisasi cita-cita yang diharapkan, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:



Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. al-An’am: 162)

Begitu pula menurut Muhammad Abduh, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dalam prosesnya mampu mengembangkan seluruh fitrah peserta didik, terutama fitrah akal dan agamanya. Dengan fitrah ini peserta didik dapat mengembangkan daya berfikir secara rasional. Sementara melalui fitrah agama akan tertanam pilar-pilar kebaikan pada peserta didik yang kemudian terimplikasi dalam seluruh aktifitas hidupnya. Dalam konteks ini, tugas utama pendidikan agama dalam perspektif Islam adalah menciptakan sosok peserta didik berkepribadian paripurna (insan kamil), oleh karena itu pelaksanaan Pendidikan Islam seyogyanya lebih menekankan pada aspek agama dan akhlak, disamping intelektual dan rasional.

Penekananannya bersifat menyeluruh dan memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, yang meliputi potensi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual secara seimbang dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dimana pendidikan itu

dilaksanakan. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk menciptakan sosok peserta didik berkepribadian paripurna (insan kamil), Maka disinilah peran lembaga pendidikan nasional yang merupakan suatu institusi publik telah berupaya untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu mencerdaskan kehidupan manusia. Sebagai institusi publik tentunya lembaga tersebut haruslah akuntabel, berarti transparan, terbuka, dapat dinilai oleh anggota masyarakat. Dengan kata lain performance lembaga tersebut haruslah mempunyai indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya guna menunjang terwujudnya *good governance* khususnya dalam bidang pendidikan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. Pertama, karena pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana pemerintah selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Keberhasilan mempraktekkan *good governance* pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan *good governance* bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan sebagaimana yang diterapkan di sekolah SMA Muhammadiyah 3 Surabaya dalam mengelola semua bidang yang ada didalamnya. Contohnya dalam bidang keuangan, setiap pengeluaran ataupun pemasukan selalu ada pertanggungjawaban dari pihak keuangan, ada bukti pembukuan dari pengeluaran ataupun pemasukan tersebut. Dengan kata lain tidak mungkin adanya korupsi atau penyelewengan dalam bidang keuangan tersebut.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek *good governance* seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pengelolaan lembaga pendidikan. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak. Dengan memulai perubahan pada bidang pendidikan yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, upaya melaksanakan *good governance* akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu pendekatan yang harus sekaligus dilakukan, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan tentang pentingnya mutu dalam pendidikan
2. Memasyarakatkan pedoman *good governance* secara rasional. Dalam konteks sismennas, yang pertama merupakan kebijakan umum atau strategis di tingkat nasional dan yang kedua merupakan kebijakan manajerial, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral bidang pendidikan. Seharusnya, pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Pendekatan lainnya adalah perlu dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan bagi pihak-pihak terkait maupun pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan *good governance* dalam bidang pendidikan dengan melakukan kegiatan, misalnya self assessment, kemudian memasang rambu-rambu

pada masing-masing instansi dan pemerintah daerah. Selain itu, bisa juga dengan memperbanyak agen-agen perubahan mutu dengan mengembangkan training bagi pejabat-pejabat publik dan pimpinan lembaga pendidikan tentang manajemen mutu terpadu ini.

Karakteristik yang melekat dalam praktek *good governance* di bidang pendidikan harus memberi ruang kepada pihak diluar pemerintah, terutama masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara mereka. Dengan demikian maka peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan guna menunjang terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di depan, maka akan dikemukakan analisis berdasarkan hasil analisis deskriptif.

A. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam dan semua bidang yang ada didalamnya berdasarkan kebijakan kepala sekolah sudah tercapai sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu

bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekcoan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan

masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan-kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesenjangan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, hal 182

B. Kendala didalam Menerapkan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa Kendala didalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam pada saat ini adalah kurangnya transparansi (keterbukaan) supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, khususnya dalam bidang keuangan, kecuali kepada pihak yang bersangkutan. Karena hal ini dianggap persoalan yang urgen dan khusus, tidak semua pihak mengetahuinya. Berbeda dengan bidang-bidang lain yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, supervisor selalu transparansi kepada para staf-stafnya dalam semua masalah yang terjadi didalam lembaga tersebut.

C. Dampak *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa salah satu dampak atau pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam adalah terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan lembaga pendidikan Islam pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.